

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Alvi Syahrin, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003.

Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Andi Bustamin Daeng Kunu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2012.

Boedi Harsono, "Kasus-Kasus Pengadaan Tanah Dalam Putusan Pengadilan Suatu Tinjauan Yuridis", Makalah pada Seminar Nasional Pengadaan tanah untuk Pembangunan, Jakarta: 3 Desember 1994, Jakarta, 1994.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, 2004.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Cet. III, Jakarta, 2015.

I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, cet. 1, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Iskandar Mudakir, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.

Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Indiplisiner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum, dan Seni)*, Paradigma, Yogyakarta, 2005.

- Maria S.W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta, 2001.
- Muhammad Yamin, Abdul Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Maria S.W. Sumardjono, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2015.
- Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria*, Cetakan I, Yogyakarta, 2007.
- Mukmin Zakie, *Kewenangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum*, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kedua*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Rusmadi Murad, *Administrasi Pertanahan*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Soimin Soedaryo, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Cet. I, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soejono, *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna Dan Hak Guna Bangunan*, Rineka Cipta, Cet II, Jakarta, 2003.
- Sadjijono, *Bab-bab Pokok Hukum Administrasi*, Cetakan ke II, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Said Umar Dan Suratman, *Hukum Pengadaan Tanah*, Setara Press, Cet. II, Malang, 2015.

Triana Rejekiningsih, *Hukum Agrarian Bagi Warganegara*, Surakarta, 2011.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen).

Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya.

Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 Tentang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Keppres Nomor: 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Keppres Nomor: 34 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Wewenang Kebijakan Pertanahan.

Perpres Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Perpres Nomoer: 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor: 36 Tahun 2005.

Perpres Nomor: 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1 Tahun 1994.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor: 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor: 65 Tahun 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 1996 Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Putusan Pengadilan Negeri Wates dengan Register Perkara Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN.Wat.

Putusan Kasasi dengan Register Nomor: 3187 K/PDT/2016 dan telah diputus pada tanggal 14 November 2016.

